

# PERAN PEMERINTAH DESA GLAGAHWANGI SUGIHWARAS BOJONEGORO DALAM PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF FIQH *SIYĀSAH*

**Muchamad Mirsa Kurniawan**

Panwaslu Sidoarjo | Jl. Pahlawan I No 5 Sidoarjo Jawa Timur  
muhammadyahya.yahya@yahoo.com

**Abstract:** the role of village administration of Gagahwangi Sugihwaras Bojonegoro in implementing the village programs is discussed in this article from the perspective of Islamic political science. The performance of village administration is based on the Law 6/2014 on Village which distributes the village administration between village head and village consultative body. In Glagahwangi, it turns out that the role of village head is more dominant than Village consultative body. Villagers directly delivers their aspiration to village head who is proven to accommodate their aspiration. Whereas Village consultative body is only important in proposing the village head, forming village head election and formulating its statutes. From Islamic political science, the village administration of Glagahwangi has performed its duty to realize villagers' good and to ensure the order for the profane and religious affairs, therefore it is similar to the concept of *ahl al-hall wa al-'aqd*.

**Keywords:** Village administration, village programs, Islamic political science.

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang peran pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro dalam pelaksanaan pembangunan desa perspektif fiqh *siyāsah*. Kinerja pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, peran kepala desa masih lebih dominan dibanding Badan Permusyawaratan Desa. Kebanyakan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa yang dinilai proaktif dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Adapun Badan Permusyawaratan Desa Glagahwangi bertugas mengusulkan pengangkatan kepala desa ketika akan habis masa jabatannya,

membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menyusun tata tertib BPD. Dalam perspektif *fiqh siyâsah*, peran pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro telah menjalankan tugas untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, sesuai dengan konsep *imâmah* dan *ahl al-hall wa al-'aqd*.

**Kata Kunci:** Pemerintah desa, pembangunan desa, *fiqh siyâsah*.

## Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi,<sup>1</sup> di mana dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang", "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".<sup>2</sup>

Dengan demikian, pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di dalam pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah yang lebih kecil yaitu pemerintah desa dan kelurahan yang merupakan pemerintah terdepan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Kencana, 2010), 5.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintah desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, pemerintah desa bersama BPD dan juga perangkat desa dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, Pemerintah desa mempunyai peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram, dan lebih nyaman, serta menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan yang berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi negara seperti presiden sampai tingkat daerah dan desa.

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama. Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan, maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak

---

<sup>3</sup> [http. Academiaedu.com](http://Academiaedu.com), Diakses pada 20 Maret 2015.

kemanusiaan.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, di sinilah pentingnya peran pemerintah dari tingkat yang paling atas yaitu presiden, menteri sampai ke tingkat pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum.

Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini terdapat atau dipertegas dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pada pasal 1 ayat satu "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".<sup>5</sup> Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 itu diperkuat dengan PERDA Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa.

Penjelasan undang-undang tersebut sangat bagus dan jelas, akan tetapi dalam implementasi memerlukan pengaturan lebih rinci sehingga desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa melaksanakan kewenangan hak dan kewajiban dengan baik selaku pimpinan pemerintah desa. selain kepala desa di dalam undang-undang juga dijelaskan tentang BPD yang bertugas untuk melaksanakan dan juga mengawasi pembangunan dan kesejahteraan desa agar terciptanya kesadaran terhadap masyarakat dan mewujudkan serta menumbuhkan jiwa gotong royong dan mendorong kemajuan desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, kepala dusun/unsur wilayah, unsur pelaksana teknis dan bermitra secara sejajar dengan Badan Pemusyawaratan

---

<sup>4</sup> Machnun Husain, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Desa (BPD) selaku legislatif di tingkat desa. Dalam fiqh *siyāsah* terdapat prinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”<sup>6</sup>

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazarin dan dikembangkan oleh Sajuti Thalib,<sup>7</sup> maka dari ayat itu dapat ditarik dua garis hukum, yaitu; *Pertama*, manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum *kedua* yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Kata *Amanat* dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dapat dipahami kata amanat itu adalah suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat di sebut “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah.

Kekuasaan dalam Islam ialah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah”.<sup>8</sup>

Namun pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan belum dapat direalisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2002,

<sup>7</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Islam*, (tp: tp., 1999), 79.

<sup>8</sup> Ibid.

Kabupaten Bojonegoro yang sampai saat ini pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan pembangunannya. Karena itu, artikel ini membahas tentang “Kajian Fiqh *Siyāsah* tentang Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”.

### Profil Desa Glagahwangi

Desa Glagahwangi terletak kurang lebih 25 KM dari pusat kota Bojonegoro. Dari Kecamatan Sugihwaras kurang lebih 2 KM arah utara. Glagahwangi merupakan desa yang subur. Luas wilayahnya mencapai 315 Ha/M<sup>2</sup> yang terdiri dari 150 Ha/M<sup>2</sup> tanah sawah, 53Ha/M<sup>2</sup> tanah pemukiman, 83Ha/M<sup>2</sup> tanah perkebunan dan selebihnya merupakan sungai. Desa Glagahwangi merupakan desa paling luas di antara desa-desa yang berada di Kecamatan Sugihwaras.

Secara demografis, Glagahwangi didiami oleh 1.278 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di empat dusun, yaitu Purung, Krajan, Rowoanyar, dan Dugo. Jumlah seluruh warga desa Glagahwangi sebanyak 4.605 orang, yang terdiri dari 2.295 laki-laki dan 2.310 perempuan.<sup>9</sup>

**Tabel 01**  
**Jumlah Penduduk**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah laki-laki	2.295 orang
2.	Jumlah perempuan	2.310 orang
3.	Jumlah total	4.605 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1.278 orang
5.	Kepadatan penduduk	1.152/ km <sup>2</sup>

Sampai saat ini Desa Gelagahwang memasuki Periode ke VIII dari 7 orang pemimpin:

<sup>9</sup> Data Desa Glagahwangi Pada Tanggal 08 Juni 2015.

- a. Periode I dipimpin oleh Dalong pada tahun Seumur Hidup.
- b. Periode II dipimpin oleh Langsir pada tahun Seumur Hidup.
- c. Periode III dipimpin oleh Ngatemin pada tahun Seumur Hidup.
- d. Periode IV dan V dipimpin oleh Lasman pada tahun 1994-2004.
- e. Periode VI dipimpin oleh Jumari pada tahun 2004-2008.
- f. Periode VII dipimpin oleh Julik pada tahun 2008-2013.
- g. Periode VIII sampai sekarang dipimpin oleh Haris Aburyanto pada tahun 2013-sekarang.

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang sangat berpengaruh terhadap gerak pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik, baik sebagai objek maupun sebagai subjek pembangunan dan kesejahteraan. Adapun jumlah mata pencaharian anggota keluarga sebagai berikut:

**Tabel 02**  
**Mata Pencaharian Penduduk Sugihwaras**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	296	2064
2	Buruh tani	169	216
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10	2
4	Pedagang keliling	10	5
5	Montir	3	11
6	TNI	1	10
7	Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI	2	2
8	Sopir	4	-

Dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat, di wilayah Desa Glagahwangi memiliki sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 03**  
**Sarana Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
-----	------------	--------

1	TK/TPA	2 buah
2	SD/MI	2 buah
3	SLTP	-
4	SMA	-

Berdasarkan data tingkat pendidikan masyarakat adalah:

**Tabel 04**  
**Pendidikan Masyarakat**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	296 orang
2	Tamat SD	308 orang
3	Tamat SLTP	290 orang
4	Tamat SLTA	200 orang
5	Tamat D.1	40 orang
6	Tamat D.2	10 orang
7	Tamat D.3	20 orang
8	Lulus Perguruan Tinggi	9 orang

Kondisi perekonomian masyarakat Glagahwangi masih tergolong menengah ke bawah. Pendapatan warga rata-rata sebesar Rp 500.000-1.000.000/bulan, dengan mata pencaharian masih mengandalkan sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.

Dengan melihat jumlah penduduk desa Glagahwangi yang mencapai 4.605 orang,<sup>10</sup> maka dapat dipastikan bahwa angka pengangguran di desa Glagahwangi masih tidak sedikit. Hal itulah yang menyebabkan rendahnya pendapatan penduduk.

### **Landasan Dasar Desa Glagahwangi**

Guna mengatur jalannya pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Glagahwangi bersama-sama dengan perangkat desa membuat berbagai peraturan desa sebagai dasar operasional pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dan dilaksanakan oleh kepala desa selaku

<sup>10</sup> Data Kependudukan Desa Glagahwangi.



pemerintahan desa dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, yaitu PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Ketua RW, Ketua RT serta Komponen Masyarakat.

Dasar Hukum:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
- f. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- g. Peraturan Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019.

### **Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Glagahwangi**

Pemerintahan Desa Glagahwangi terdapat struktur organisasi yang terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur keuangan. Kemudian ada kaur kesra, kaur pemerintahan, kaur pembangunan yang sejajar dengan kepala dusun Purung, kepala dusun Dugo, kepala dusun Rowoanyar, dan kepala dusun Krajan. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintahan desa yang terdiri dari 5 anggota BPD, 10 perangkat desa.

Secara garis besar, tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat desa pada khususnya adalah peningkatan kesejahteraan atau peningkatan taraf hidup

masyarakat. Memang benar, pengertian taraf hidup masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, yaitu; dimensi fisik, ekonomi, mental dan sosial. Dengan menggunakan ukuran relatif dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat akan meningkat apabila semakin banyak kebutuhan dapat dipenuhi.

Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk dapat memenuhi semakin banyak aspek kebutuhan tersebut. Walaupun diakui bahwa kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi, banyak pendapat yang mengatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan kebutuhan pada dimensi yang lain. Dengan menggunakan asumsi kasar bahwa mayoritas penduduk negara-negara sedang berkembang tinggal di desa dan mayoritasnya warga masyarakat bekerja di sektor pertanian, maka agar pendapatan masyarakat meningkat diperlukan produktifitas pertanian.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian tersebut tidak lepas dari peran pemerintahan desa sebagai akses pendukung untuk membawa masyarakat desa bisa berkembang dan sejahtera. Penyelenggara pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, di mana kepala desa diharapkan mampu menggerakkan masyarakatnya dalam bergotong royong membangun desa.<sup>11</sup>

Akan tetapi dalam sisi lain, dalam proses pembangunan desa, BPD Desa Glagahwangi kurang menstimulus masyarakatnya agar bersifat kritis dan partisipatif, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintah desa ini kurang menerapkan prinsip partisipatif dan

---

<sup>11</sup> Suprayitno, *Wawancara*, Rumah Bapak Suprayitno, 05 juli 2015.

demokratis, padahal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga. Tujuan utama adanya lembaga BPD ini tidak lain untuk memberdayakan aspirasi masyarakat, agar sesuai dengan amanat undang-undang. Pemberdayaan masyarakat merupakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan yang lainnya sebagai mitra pemerintah desa.<sup>12</sup>

Peran pemerintah desa atau kepala desa Glagahwangi lebih dominan daripada BPD. Kebanyakan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa yang dinilai proaktif dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.<sup>13</sup>

Dari beberapa tugas serta fungsi yang ada, BPD Glagahwangi menjalankan beberapa tugasnya, yaitu; *Pertama*, mengusulkan pengangkatan kepala desa ketika akan habis masa jabatannya. *Kedua*, membentuk panitia pemilihan kepala desa. *Ketiga*, menyusun tata tertib BPD.

Permasalahan pemerintah desa Glagahwangi lainnya adalah pada perangkat desa, yang tingkat SDMnya masih terbilang rendah. Perangkat desa banyak yang kurang memiliki keahlian dalam bidang administrasi perkantoran, dan ada yang kurang memahami teknis pemerintahan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Siti Aminah, *Wawancara*, Dusun Purung, di rumah Ibu Siti Aminah, 06 juli 2015.

<sup>14</sup> Kamiran, *Wawancara*, Kantor Desa Glagahwangi, 6 Maret 2015.

## **Kajian Fiqh *Siyâsah* terhadap Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Glagahwangi**

Pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung di bawah kecamatan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, pemerintahan desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dalam prespektif hukum Islam, pemerintahan desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai pelaksanaan amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."<sup>15</sup>

Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Shalih Abu Hurairah yang berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda:

"Sepeninggalanku akan datang kepada kalian pemimpin-pimimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebajikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang jahat dengan membawa

---

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Jumanatul 'Ali*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005),

kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa".<sup>16</sup>

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Namun dalam artikel ini lebih menerangkan tentang pandangan fiqh *siyâsah* mengenai kedudukan Pemerintah Desa dan BPD.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam Surat Ali Imran ayat 188 yang artinya:

"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih."<sup>17</sup>

Dengan demikian sudah jelas pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat pemerintahan desa, karena dalam al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 188, Allah memerintahkan umatNya untuk mengambil dan menjanjikan orang-orang yang dipercaya didalam menjalankan roda pemerintahan pusat maupun desa yaitu orang-orang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat istiadat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan dipilihnya kepala pemerintahan dari golongan

---

<sup>16</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2007), 2.

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2002), 108.

sendiri maka lembaga *imamah* (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan Imam Al-Mawardi sebagaimana berikut:

- a. Mempertahankan dan memelihara agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi *ijma'* oleh *salaf* (generasi pertama umat Islam).
- b. Melaksanakan kepastian hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya.
- c. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.
- d. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.
- e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f. Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwa agar mereka mengakui eksistensi Islam.
- g. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara'*, *nash* dan *ijtihad*.
- h. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif
- i. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya
- j. Mengatur umat dan memelihara agama, pemerintahan dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.<sup>18</sup>

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, landasan pemikiran pengaturan mengenai desa mengacu pada undang-undang terbaru tersebut. Dalam Undang-Undang

---

<sup>18</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, t.t.), 260.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bagian Kesatu pasal 1 ayat 2,3 dan 4 disebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan BPD. Kemudian dijelaskan lagi pada Bagian kesatu pada pasal 25 "Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain".

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Pasal 11 disebutkan bahwa yang dimaksud pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan BPD. Kemudian dijelaskan kembali pada bagian kedua Tentang Pemerintahan Desa paragraf Pasal 12 disebutkan;

- 1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- 3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
  - c. Unsur Kewilayahan.
- 4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- 5) Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Adapun Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa diatur dalam Pasal 14 yaitu:

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 279.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - d. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Melakukan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 15 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

---

<sup>20</sup> Ronal Siahaan, dkk. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia & Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 Tentang Desa, Kelurahan dan Kecamatan, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, t.t.). 21



- g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;<sup>21</sup>
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- 3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- 4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun musyawarah BPD.
- 5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai

---

<sup>21</sup> Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum*, (Yogyakarta: Madyan Press Yogyakarta, 2002), 242.

pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

- 6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- 7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Adapun Prinsip yang diajarkan dalam Islam yaitu Musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahkan umatNya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintahan dengan cara musyawarah (syura), dalam Surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman yang artinya<sup>22</sup>:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya”.

Dalam kajian *Fiqh Siyāsah* dikenal istilah *Ahl al-hall wa al-'aqd* yang artinya “Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat” istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu *ahl al-hall wa al-'aqd* juga disebut oleh Imam Al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiyār* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih

---

<sup>22</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 258.

salah seorang diantara *ahl al-imâmah* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.<sup>23</sup>

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *ahl al-hall wa al-'aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fiqh diklaim sebagai *ahl al-hall wa al-'aqd* yang bertindak sebagai wakil umat.<sup>24</sup> Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kemudian kedua tokoh itu mendapat pengakuan dari umat. Dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* ialah orang-orang yang berkecimpungan langsung kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya."

Bertolak dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *ahl al-hall wa al-'aqd* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah dalam pemikiran ulama fiqh, dan kecendrungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Daerah dan sampai unit pemerintahan terendah di Indonesia

---

<sup>23</sup> Muhammad Tahir Azhariy, *Negara Hukum (Suatu Studi Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), 112.

<sup>24</sup> Taufiq al-Syawi, *Syuro Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 279.

yaitu di tingkat Desa dikenal adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berbicara terkait dengan peranan di mana tidak lepas dari tugas dan wewenang. Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwarah Kabupaten Bojonegoro mempunyai masalah kompleks terkait dengan Pemerintah desa dan BPD yang dimana keduanya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa masih belum bisa satu visi dan satu misi di karenakan gesekan politik akibat pemilihan Kepala Desa pada Periode yang menjadikan Bapak Haris Aburyanto sebagai Kepala Desa.<sup>25</sup>

Salah satu faktor yang mempengaruhi, bahkan yang menentukan hasil atau gagalnya kegiatan pemerintah desa ialah keuangan desa. Pemerintah desa telah berkembang, betapapun lambat laju perkembangannya. Masalah-masalah pemerintahan di desa bertambah banyak dan kompleks, serta cenderung melampaui *'financicle'*. Gejala ini nampaknya cukup dan sudah saatnya mendapat perhatian, khususnya dalam rangka pembangunan di desa. Banyak kegiatan di desa, yang terpaksa dilaksanakan melalui bentuk uang misalnya pembuatan dam, jembatan, jalan, semula dapat dikerjakan dengan bantuan berupa bahan dan tenaga dari masyarakat. Jenis kegiatan pemerintah desa kian hari bertambah, demikian pula aneka-ragamnya, dikarenakan kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah tanpa akhir. Sehingga Pemerintah desa perlu mempelajari dan mengerti administrasi keuangan yang mencakup prosedur anggaran statistik dan lain-lain yang bersangkutan dengan keuangan.<sup>26</sup>

Dengan menggunakan asumsi kasar bahwa mayoritas penduduk desa dan mayoritas warga masyarakat desa bekerja di sektor pertanian, maka agar pendapatan masyarakat meningkat diperlukan peningkatan produktifitas pertanian. Pola pikir seperti itu juga banyak digunakan pada saat orang berusaha mencari

---

<sup>25</sup> Haris Aburyanto, *Wawancara*, Glagahwangi, 21 Maret 2015.

<sup>26</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintah Adinistrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 99.

sektor kunci dalam pelaksanaan pembangunan. Maka BPD dan pemerintah desa hendaknya bersama-sama bergerak menjalankan visi dan misi yang sudah dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Penutup

Terkait kinerja pemerintah desa dan BPD yang kita ketahui bersama ialah antara pemerintah desa dan BPD tidak menjalankan tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) UU Desa yang menyatakan bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Sedangkan BPD bertugas membahas dan menyepakati rancangan perturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa bukannya malah menghalangi atau memperlambat. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa BPD perlu ada evaluasi demi kelancaran pembanguna desa kedepannya.

Dalam perspektif fiqh *siyâsah*, peran pemerintah desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro telah menjalankan tugas untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, sesuai dengan konsep *imâmah* bagi kepala desa dan strukturnya dan sesuai dengan konsep *ahl al-hall wa al-'aqd* bagi tugas Badan Permusyawaratan Desa.

### Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam)*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- al-Syawi, Taufiq. *Syuro Bukan Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Aminah, Siti. *Wawancara*, Dusun Purung, di rumah Ibu Siti Aminah, 06 juli 2015.

- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Islam*. ttp: tp., 1999.
- \_\_\_\_\_. *Negara Hukum (Suatu Studi Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Data Desa Glagahwangi Pada Tanggal 08 Juni 2015.
- Data Kependudukan Desa Glagahwangi.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Fajar Mulia, 2002.
- Aburyanto, Haris. *Wawancara*. Glagahwangi, 21 Maret 2015.
- [http. Academiaedu.com](http://Academiaedu.com), Diakses pada 20 Maret 2015.
- Husain, Machnun. *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqih Siyash*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kamiran. *Wawancara*. Kantor Desa Glagahwangi, 6 Maret 2015.
- Siahaan, Ronal. dkk. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia & Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 Tentang Desa, Kelurahan dan Kecamatan*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, t.t.
- Suprayitno. *Wawancara*. Rumah Bapak Suprayitno, 05 juli 2015
- Surianingrat, Bayu. *Pemerintah Adinistrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Thontowi, Jawahir. *Islam, Politik, dan Hukum*. Yogyakarta: Madyan Press, 2002.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.